

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS



VISI : TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG AKUNTABEL



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	6
A. Pengukuran Kinerja	7
B. Analisis Kinerja.....	7
C. Realisasi Anggaran	21
D. Analisis Efisiensi	22
Bab IV Penutup	23



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2019



**KERALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS**

GENDRAYA ROHAINI, ST. M. Si
Pembina

NIP. 19780508 200604 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dimana selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdapat **3 (Tiga) sasaran** dan terdapat **6 (Enam) indikator** untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran serta bimbingan dari pimpinan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pendataan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Sanitasi, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Pendukung.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
 - c. Seksi Penatagunaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021

Sasaran	Indikator	Target (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12	15	20	25	30
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	20	40	60	80	100
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	10	25	50	75	100
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB

B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target (%)
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	60
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	50
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20	30,32	65,95
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046	0,0020	43,27
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	100	100
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	60	36,97	61,62
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	50	0	0
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari **3 (tiga) sasaran** dan **6 (enam) indikator** tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:



Sasaran 1:
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman

Indikator	2018	2019			Capaian 2018 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana utilitas umum (PSU)	94,62	20	30,32	65,95	30
Rata-rata capaian				65,96	45,48

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa pembangunan: **Prasarana Terdiri Atas:** Cakupan Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. **Sarana terdiri atas:** Cakupan Rumah Ibadah Komunitas dan **Utilitas Umum terdiri atas:** Cakupan Listrik Pemerintah/PLN dan Jaringan Nirkabel.

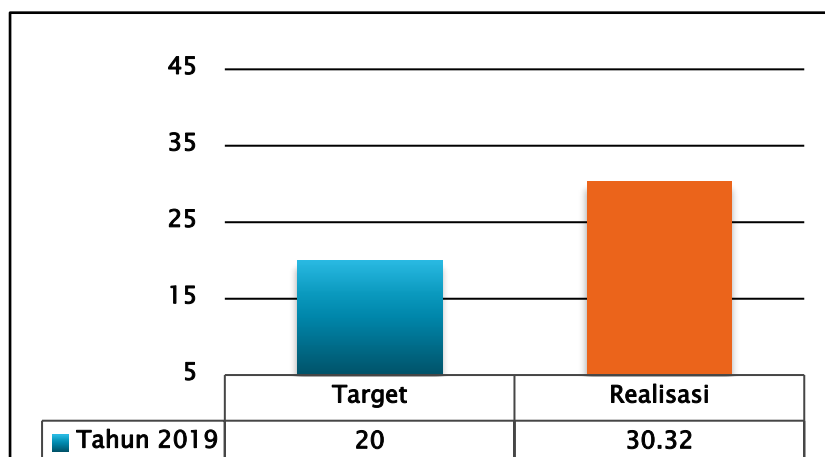
Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dapat dianalisis melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan untuk mengetahui cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan pengkategorian sebagai berikut:

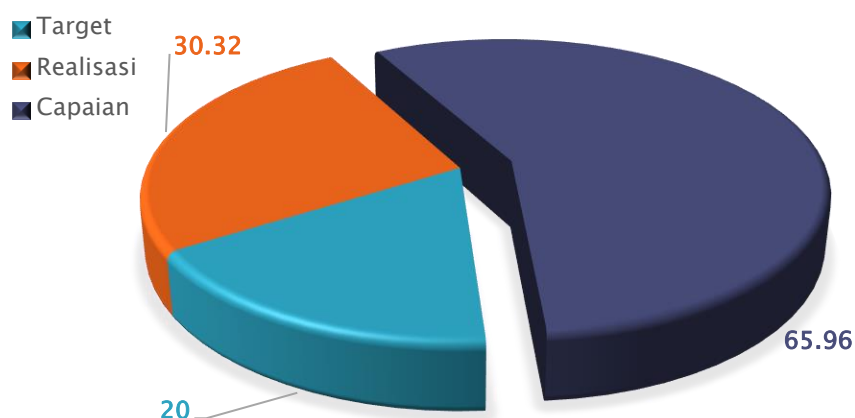
1. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) kondisi terpenuhi dan berfungsi dengan baik terdiri dari **8 komponen PSU** pada Tahun 2019 antara lain: **Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan, Rumah Ibadah Komunitas, Listrik Pemerintah/PLN dan Jaringan Nirkabel.**
2. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) kondisi terpenuhi dan berfungsi dengan baik terdiri dari **7 komponen PSU** pada Tahun 2019 antara lain: **Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan, Rumah Ibadah Komunitas, Listrik Pemerintah/PLN.**
3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) kondisi terpenuhi dan berfungsi dengan baik terdiri dari **6 komponen PSU** pada Tahun 2019 antara lain: **Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Rumah Ibadah Komunitas, Listrik Pemerintah/PLN.**



Skor Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Tahun 2019



Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman (Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas umum (PSU))



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi sesuai dengan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
- Persentase capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2019

Berdasarkan pemaparan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) diatas, untuk mengetahui jumlah lingkungan (Kelurahan/Desa) yang didukung PSU kurun waktu tertentu dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



**Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang Didukung PSU	Keterangan
1.	Bengkalis	31	9	
2.	Bantan	23	3	
3.	Siak Kecil	17	5	
4.	Bukit Batu	10	5	
5.	Bandar Laksamana	7	2	
6.	Rupat	16	4	
7.	Rupat Utara	8	2	
8.	Mandau	11	9	
9.	Bathin Solapan	13	3	
10.	Pinggir	10	4	
11.	Talang Muandau	9	1	
JUMLAH		155	47	

Berdasarkan tabel diatas, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) kondisi terpenuhi dan berfungsi dengan baik pada Desa dan Kelurahan yang terpenuhi berjumlah: 47 Kelurahan/Desa, Sedangkan Komponen PSU yang telah terealisasi pada Tahun 2019 yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	PSU								
	Jalan Lingkungan (M)					Drainase/ Sanitasi (M)	Pedestrian (M)	Taman/RTH (M2)	PJU (M)
	Badan Jalan	Penimbunan (Base)	Burda	Beton	Hotmix				
1.	21.320	8.908	5.707	45.147	0	16.268	0	0	54.931

Berdasarkan tabel diatas, Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah merealisasikan pembangunan dan Peningkatan PSU jalan lingkungan permukiman sepanjang: **81.083 M** terdiri dari pekerjaan: badan jalan, penimbunan (base), burda, dan beton. Pembangunan dan peningkatan drainase (parit lingkungan) pada Tahun 2019 terealisasi sepanjang **16.268 M** dan PJU yang terbangun sepanjang: **54.931 M**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

PSU merupakan satu kesatuan yang memiliki andil penting (vital) bagi meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, selain itu keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman harus mendapat apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat, ditambah ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dan SDM aparatur pemerintah merupakan nilai tambah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



Permasalahan/Hambatan

Ketersediaan data jalan melalui Surat Keputusan (SK) dan integrasi perencanaan antara OPD terkait (Dinas PUTR) dan Pihak Desa, khususnya penyediaan infrastruktur permukiman jalan lingkungan harus segera dilaksanakan, hal tersebut menghindari *overlapping* perencanaan pembangunan, selain itu perlu dipertegas batas wewenang OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi, sehingga peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat lebih optimal.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

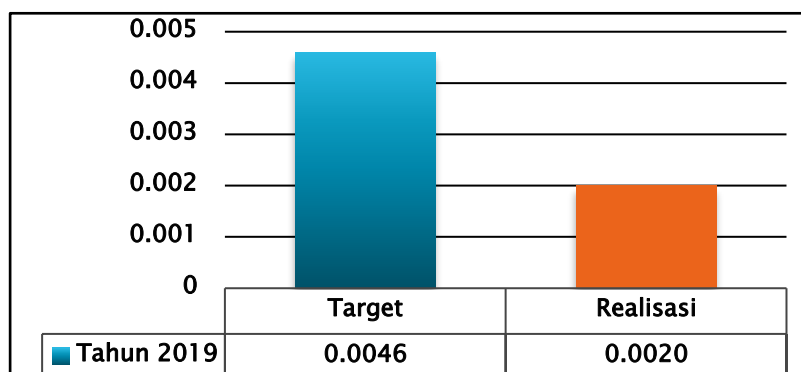
Perlu dilakukan pemerataan desa/kelurahan yang terpenuhi cakupan layanan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dibutuhkan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merangkul OPD terkait khususnya menghindari *overlapping* (tumpang tindih) penataan kawasan permukiman yang tercakup dalam PSU serta meneliti kembali wilayah yang menjadi sasaran pembangunan PSU di Kabupaten Bengkalis.

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator	2018	2019		Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Lingkungan permukiman kumuh	43,30	0,0046	0,0020	43,27
Rata-rata capaian				43,27

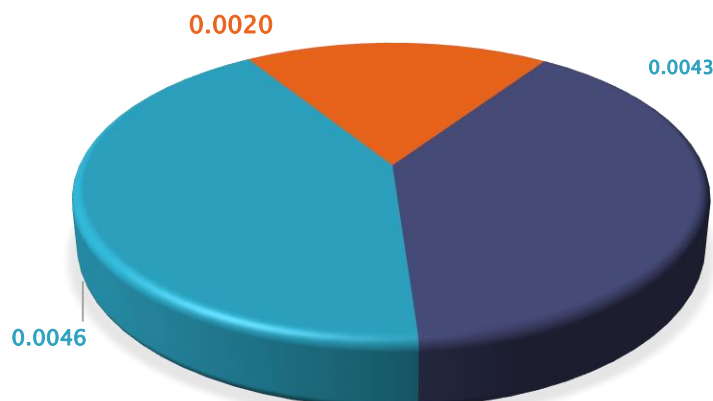
Berdasarkan tabel diatas: Meningkatnya Kualitas Permukiman yang Tertata target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar: 0,0046% terealisasi: **0,0020% atau 43,27%** sehingga secara umum adanya pengurangan luas kawasan permukiman kumuh yang ditarget oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019.

Skor Capaian Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2019





Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman (Lingkungan Permukiman Kumuh)



Capaian Kinerja

- Persentase rencana terhadap lingkungan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi sesuai dengan lingkungan permukiman kumuh
- Persentase capaian lingkungan permukiman kumuh Tahun 2019

Sebagaimana diketahui bahwa penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014 pada 12 kawasan permukiman kumuh dengan luas wilayah penetapan seluas: **1,8033 Km²**. Penataan kawasan permukiman kumuh telah dilakukan pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman sampai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

No	Tahun	Kawasan Permukiman Kumuh	Jenis Penataan	Luas Kawasan yang Telah ditata (Ha)	Ket
1.	2014	Kawasan Perkotaan Parit Bangkong	Revitalisasi	6,8	
		Kawasan Perkotaan Duri Barat	Revitalisasi	4,0	
2.	2015	Kawasan Perkotaan Parit Bangkong	Revitalisasi	0,8	
		Kawasan Perkotaan Kebun Kapas	Revitalisasi	1,0	
		Kawasan Perkotaan Cik Mas Ayu	Revitalisasi	0,5	
3.	2016	-	-		
4.	2017	Kawasan Perkotaan Cik Mas Ayu	Peningkatan Prasarana	0,2	
		Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	Peningkatan Prasarana	4,4	
		Kawasan Perkotaan Duri-Batang Serosa	Peningkatan Prasarana	4,4	
5.	2018	Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	4,52	
		Kws. Perkotaan Duri-Balik Alam	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	4,62	
6.	2019	Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	2,72	
JUMLAH				25,20	

Berdasarkan tabel diatas, luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan seluas: **180,33 H (1,8033 Km²)** secara bertahap dilaksanakan penataan sehingga berkurang menjadi **155,14 Hektar** yang dilaksanakan dari Tahun 2014 s.d 2019 seluas: **25,20 Hektar**. Sedangkan pada Tahun 2019 penataan kawasan kumuh dilaksanakan melalui program Pemerintah Pusat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Tahun 2017 s.d 2019.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Penataan kawasan permukiman kumuh merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui gerakan 100-0-100 (100% layanan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% layanan sanitasi) dan kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sehingga secara tidak langsung dukungan penuh baik secara aturan, tenaga teknis dan sharing anggaran. Selanjutnya dengan ditetapkan lokasi/titik pemetaan kawasan kumuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk keseriusan didalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis serta dukungan anggaran yang dialokasikan diharap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Permasalahan/Hambatan

Secara geografis kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bengkalis yang tersebar dan prioritas penanganan menjadi permasalahan tersendiri, hal tersebut dilihat dari ketersediaan anggaran yang dialokasikan harus mempertimbangkan aspek skala prioritas dan dampak secara sistemik, sehingga dengan analisa serta evaluasi kedepan diharapkan penataan kawasan permukiman kumuh dapat secara tuntas dilaksanakan. Selain itu faktor dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan sangat vital hal tersebut merupakan bagian dari sinergitas capaian, sehingga adanya rasionalisasi anggaran berpengaruh sangat signifikan terhadap target dan capain pengurangan kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Memprioritaskan kawasan permukiman kumuh yang segera ditangani melalui mekanisme skoring (penilaian) harus dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan bebrapa titik kawasan permukiman kumuh harus ditangani secara komprehensif dengan melihat aspek geografis, budaya, sosial dan yang pasti dampak terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat, selain itu perlu dilakukan revisi wilayah permukiman kumuh yang telah ditetapkan (*update*) khususnya pada pemekaran wilayah Kecamatan Bengkalis harus segera dilaksanakan, mengingat pemerataan kawasan yang butuh penataan dapat dilaksanakan segera dan dalam jangka panjang.

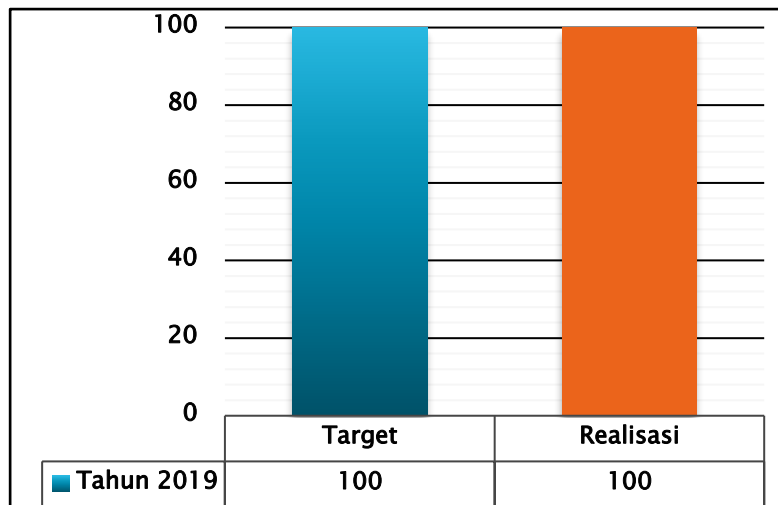
Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	0	100	100	100	100
Rata-rata capaian				100	100

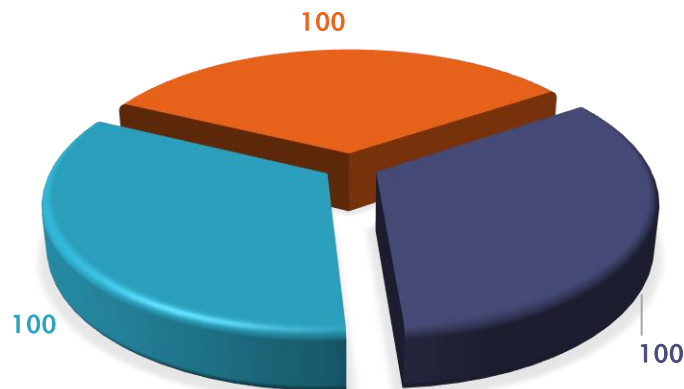
Berdasarkan tabel diatas target Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar: 100% terealisasi: 100% atau 100% dari target capaian yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis.



Skor Capaian Persentase Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2019



Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman (Persentase Rumah Layak Huni yang Dibangun)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan rumah layak huni yang dibangun yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap rumah layak huni yang dibangun di Kabupaten Bengkalis
- Persentase rumah layak huni yang dibangun Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Persentase RLH yang dibangun yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Alokasi APBD pada rentang Tahun 2015 s.d 2019 berjumlah: **4000 Unit**, sedangkan RLH bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2012 dan 2019 berjumlah: **620 Unit**.

Pembangunan RLH yang bersumberkan pada APBD T.A 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui pola Kharya Bhakti melibatkan TNI dengan target: **400 Unit** RLH dan RLH Tahap I dengan target: **600 Unit** RLH, sehingga Tahun 2019 pembangunan RLH sebanyak: **1000 Unit**.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pembangunan RLH Kabupaten Bengkalis merupakan amanah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dimana landasan utama adalah konstitusi yang telah diamanahkan negara dalam kebijakan strategis pemerintah/presiden. Sedangkan tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya dalam pelaksanaan pembangunan RLH yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis guna mendukung program penyediaan RLH bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki andil yang sangat penting ditambah kebijakan *Sharing* anggaran dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan RLH dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adalah bentuk komitmen nyata dan berkesinambungan guna mendukung kegiatan dan mengisi kekurangan alokasi pembangunan RLH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

Secara kuantitas unit RLH yang dialokasikan mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan jumlah calon penerima RLH se-Kabupaten Bengkalis belum dapat terpenuhi dengan optimal, hal tersebut dikarenakan proporsi didalam alokasi anggaran pada APBD Kab. Bengkalis khususnya pada urusan pelayanan dasar tidak hanya infrastruktur namun non infrastruktur harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan fisik daerah. Permasalahan lain yakni mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Pusat melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga menjadi hambatan didalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan RLH.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilaksanakan proses seleksi yang ketat mengenai calon penerima RLH oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sehingga diharapkan masyarakat yang tepat sasaran dan berhak sesuai kriteria yang akan mendapatkan bantuan pembangunan RLH. Selain itu perencanaan yang matang khususnya dalam pengalokasian anggaran pembagunan RLH harus digesa khususnya pada awal tahun anggaran dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sampai proses penyerahan unit RLH pada masyarakat, sehingga pengalaman secara administrasi dan teknis pembagunan RLH pada T.A 2018 menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi meningkatkan pelaksanaan tahun depan.

Sasaran 2:

Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase luas lahan bersertifikat	92,43	60	36,97	61,62	162,28
Rata-rata capaian				61,62	162,28



Berdasarkan tabel sasaran 2 diatas meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat yang ditetapkan pada Tahun 2019 dengan target yang akan dilaksanakan sebesar: 60% terealisasi: 36,97% atau 61,62% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui OPD Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi identifikasi, pemetaan permasalahan, proses pendataan, merakitulasi serta merangkumkannya dalam data pemerintah yaitu lahan yang bersertifikat yang merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui OPD yang berwenang didalam pelaksanaan pendataan aset lahan bersertifikat, secara konsisten melakukan pendataan dan realisasi sertifikasi lahan yang merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk dapat melihat pelaksanaan inventarisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Per-Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Inventarisasi Lahan/Tanah Pemda				Jumlah Luas Tanah (M ²) (4+6)	Ket
		Jumlah Bersertifikat	Luas Tanah (M ²)	Jumlah yang belum bersertifikat	Luas Tanah (M ²)		
1.	Bengkalis	123 Persil	941.214	33 Persil	2.007.375	2.948.589	1. Jumlah tanah pemerintah Kab. Bks sebanyak 487 Persil 2. Jumlah luas tanah seluas 7.603.271 M ² .
2.	Bantan	31 Persil	246.746	27 Persil	478.395	725.141	
3.	Bukit Batu	26 Persil	307.236	12 Persil	418.559	725.795	
4.	Siak Kecil	20 Persil	396.923	7 Persil	680.650	1.077.573	
5.	Mandau	42 Persil	238.100	20 Persil	743.326	981.426	
6.	Pinggir	27 Persil	147.596	3 Persil	100.365	247.961	
7.	Rupat	29 Persil	205.515	19 Persil	224.842	430.357	
8.	Rupat Utara	50 Persil	328.222	18 Persil	138.207	466.429	
	JUMLAH	348 Persil	2.811.552	139 Persil	4.791.719	7.603.271	

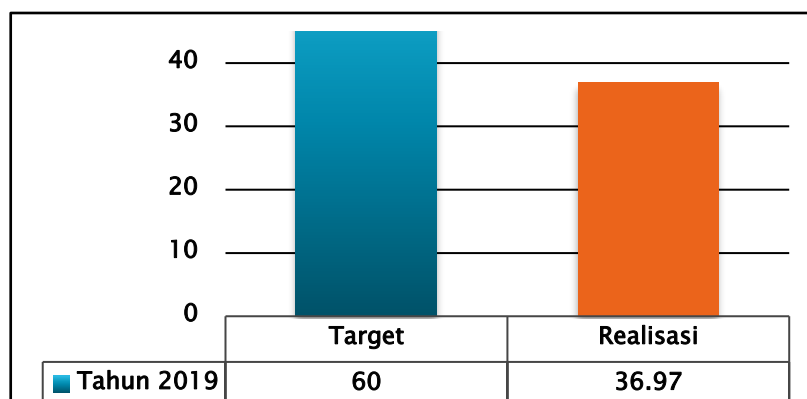
Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Lainnya Tahun 2019

No	Provinsi	Inventarisasi Lahan/Tanah Pemda				Jumlah Luas Tanah (M ²) (4+6)	Ket
		Jumlah Bersertifikat	Luas Tanah (M ²)	Jumlah yang belum bersertifikat	Luas Tanah (M ²)		
1.	DIY Jogjakarta* (Kab. Sleman)	1 Persil	168	0 Persil	0	168	* Pemecahan Serifikat dari Luas 437 M ² ** Balik nama Serifikat
2.	Jawa Barat (Kec. Bogor Barat, Kel. Marga Jaya Jl. Batu Hujung)**	1 Persil	1000	0 Persil	0	1000	

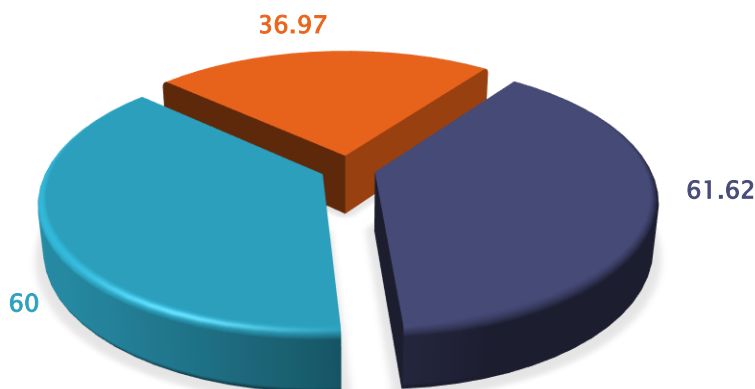


Berdasarkan data diatas, aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yang berada diluar Kabupaten dilaksanakan proses inventarisasi aset pada DIY (Jogjakarta dan Jawa Barat) dengan jumlah keseluruhan tanah yang terdata berjumlah 1.168 M². Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melalui Bidang Pertanahan dilakukan proses pemecahan sertifikat pada aset tanah di Jogjakarta dengan luas keseluruhan 437 M² dengan realisasi 168 M², sedangkan di Kabupaten Jawa Barat aset tanah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan proses balik nama sertifikat dengan luas tanah yang terdata berjumlah: 1000 M².

Skor Capaian Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2019



Capaian Kinerja Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah (Persentase Luas Lahan Bersertifikat)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap persentase luas lahan pemda yang bersertifikat secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap luas lahan pemda yang bersertifikat di Kabupaten Bengkalis
- Persentase capaian luas lahan pemda yang bersertifikat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga konsen terhadap aset tanah pada Provinsi lainnya



melalui pendataan secara bertahap, sehingga kedepan sertifikasi berjalan sesuai dengan target dan capaian yang diharapkan.

Permasalahan/Hambatan

Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas 11 Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan serta minimnya ketersediaan SDM yang berpengalaman didalam bidang pertanahan ditambah dengan beban kerja yang kompleks menjadi tantangan tersendiri pada Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

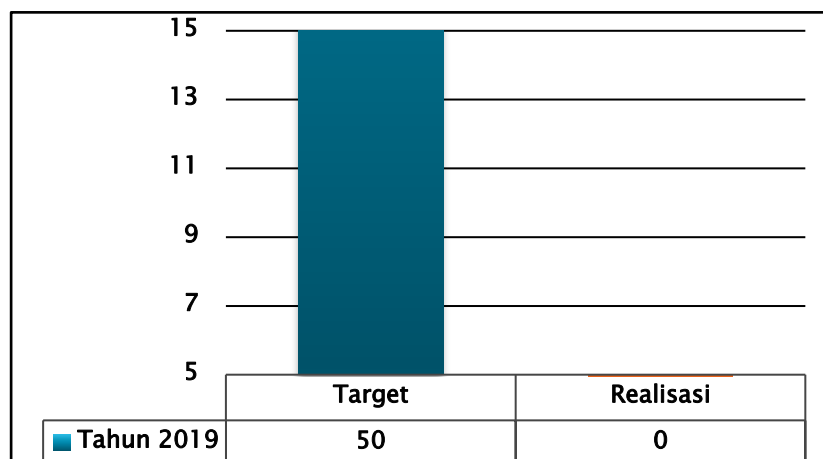
Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan lancar, selain itu dibutuhkan kerja keras khususnya pada SDM yang tersedia baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan

Indikator	2018	2019		Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	0	0	0	0
Rata-rata capaian				

Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan 2019



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian konflik pertanahan melalui ketersediaan dana tanggap terhadap langkah konkrit dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga konsen terhadap mediasi



antara pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan langkah preventif terjadinya konflik yang berhubungan dengan pertanahan.

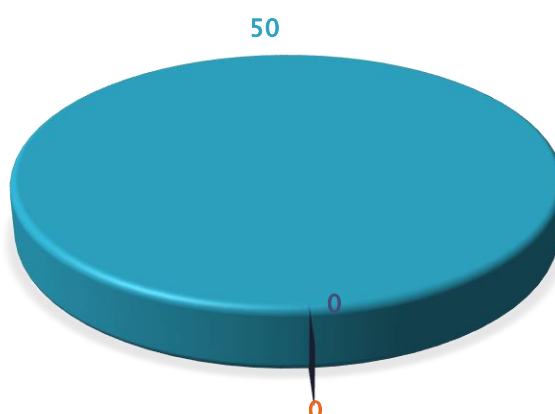
Permasalahan/Hambatan

Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas 11 Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan serta minimnya ketersediaan SDM, serta proses hukum didalam penyelesaian konflik butuh koordinasi dan waktu yang lama didalam menuntaskan konflik Kabupaten Bengkalis melalui OPD teknis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan mediasi, proses pemantauan kondisi lapangan dan langkah preventif yang harus diambil.

Capaian Kinerja Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah (Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap persentase konflik pertanahan yang diselesaikan
- Persentase terealisasi terhadap konflik pertanahan yang diselesaikan di Kabupaten Bengkalis
- Persentase capaian konflik pertanahan yang diselesaikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Sasaran 3

Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator	2018	2019		Capaian 2019 Terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	100
Rata-rata capaian			100	100

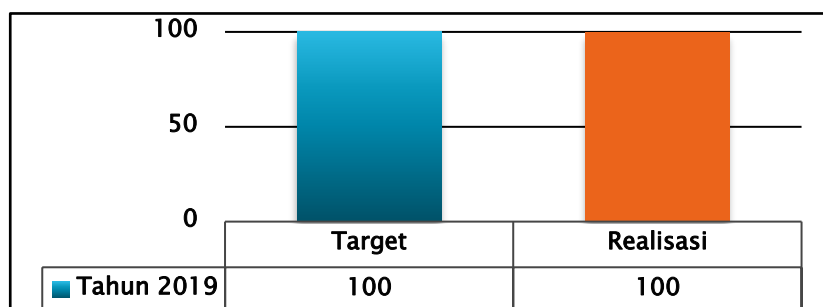
Berdasarkan tabel sasaran 3: Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2019 pada indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja ditarget nilai B (61,21) terealisasi nilai B atau Nilai B dan Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan



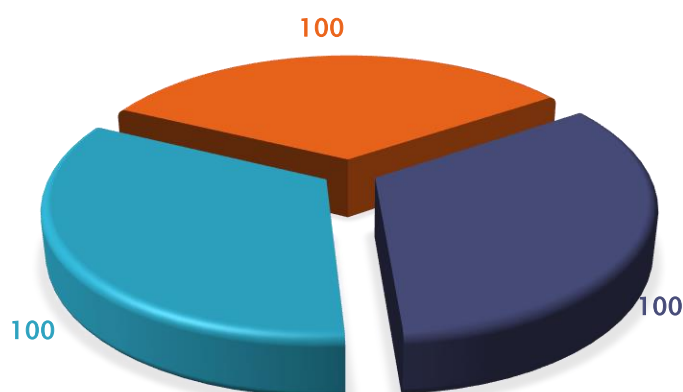
target **B** terealisasi **B** atau **B** jauh diatas ekspetasi target capaian yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Penyelesaian Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan yang ditanggapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Skor Capaian Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2019



Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja (Predikat Akuntabilitas Kinerja)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap prediket akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap prediket akuntabilitas kinerja pada OPD
- Persentase capaian tindaklanjut hasil prediket akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk memantapkan laporan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh *stockholder* yang dalam ini OPD startegis urusan wajib dan pelayanan sehingga mendukung kinerja Pemerintah Daerah serta tranparansi dalam memenuhi seluruh tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Permasalahan/Hambatan



Keterbatasan SDM dan dinamisasi organisasi menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan serius oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana keberlanjutan didalam mempersiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja membutuhkan SDM yang cakap dan kredibel, selain itu hambatan didalam tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan membutuhkan langkah yang preventif didalam melaksanakan penyerapan anggaran, pengawasan dan sosialisasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilakukan langkah konkrit berupa kesiapan SDM dan aparatur kredibel didalam melaksanakan transparansi akuntabilitas kinerja melalui laporan yang akurat, efisien dan tepat sasaran didalam menggambarkan akuntabilitas capaian realisasi capaian program dan kegiatan, selain itu dibutuhkan langkah preventif didalam mempertahankan segala tindaklanjut hasil temuan didalam memenuhi target.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 276.613.030.269** atau **89,55%** dari pagu sebesar **Rp. 308.895.273.223** Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada **sasaran 1: Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman sebesar: 86,73%**, sementara penyerapan anggaran terendah **Sasaran 2: Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah sebesar: 9,17%** Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran/Indikator	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	100	222.272.446.423	192.780.369.322	86,73
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	100	336.220.000	282.407.325	83,99
Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	80.481.950.000	79.794.007.780	99,15
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9,17	1.238.113.900	113.537.204	9,17
Persentase Konflik Tanah yang diselesaikan	50	263.311.600	86.261.034	32,76
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100	4.125.931.300	3.394.272.604	82,27
JUMLAH		308.717.973.223	276.450.855.269	89,55



D. Analisis Efisiensi

Sasaran/Indikator		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	65,95	86,73	-20,78
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	43,27	83,99	-40,72
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	99,15	0,85
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	61,62	9,17	52,45
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0	32,76	-32,76
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Prediket Akuntabilitas Kinerja	B	B	B



PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah dicapai. yaitu **3 (Tiga) sasaran** dan **6 (Enam) indikator Kinerja** kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada indikator yang tidak optimal didalam pencapaian sasaran, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2019, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus terhadap urusan pelayanan wajib yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur Perumahan khususnya penyediaan Rumah Layak Huni yang merupakan amanah undang-undang dan penyediaan Prasarana Utilitas Umum bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
2. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama, hal tersebut dikarenakan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, berkesinambungan serta layak bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
3. Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, kedepan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam pendataan asset-asset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bangkalis terhadap pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait yang dalam hal ini inspektorat merupakan komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.